

LAMPIRAN

Panduan Wawancara kepada pegawai BPKPAD Kabupaten Batang

Penulis : Kalau boleh tahu, alat Tapping Box itu apa ya Bu?

Pegawai : Itu alat monitoring transaksi usaha secara online dan dipasang di mesin kasir restoran untuk menghitung setiap adanya transaksi di restoran tersebut.

Penulis : Apakah ada dasar peraturannya di Kabupaten Batang untuk penggunaan Tapping Box?

Pegawai : Ada, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online.

Penulis : Latar belakang dipasangnya Tapping Box di restoran di Kabupaten Batang ini apa ya Bu?

Pegawai : Banyak Wajib Pajak Restoran melaporkan omzetnya tidak sesuai. Padahal restoran tersebut ramai pengunjung dan potensi pajak restorannya cukup besar. Tetapi saat membayar dan melaporkan pajak restorannya justru sedikit. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Batang mengadakan pemasangan alat Tapping Box agar pajak yang dibayarkan tidak dimanipulasi atau sesuai omzet yang ada.

Penulis : Sejak kapan dipasangnya Tapping Box pada restoran di Kabupaten Batang?

Pegawai : Sudah ada dari tahun 2017, tetapi baru dioperasikan/digunakan diakhir tahun 2018. Dan Tapping Box ini didanai oleh BPD Jateng Batang.

Penulis : Lalu apakah ada kendala dalam penggunaan alat Tapping Box pada restoran? Kalau ada apa saja?

Pegawai : Ya tentu ada. Banyak sekali kendalanya. Seperti beberapa rumah makan menolak untuk dipasang Tapping Box, kesadaran dalam menggunakan Tapping Box Wajib Pajak Restoran masih kurang, kasir pada restoran tidak memahami cara penggunaan Tapping Box, ada restoran yang berlaku curang dengan membuat server baru biar bisa memfilter penghasilannya dan pajak yang dia bayarkan lebih sedikit, ada juga data yang belum dapat diakses, lalu saat restoran sedang ramai pelanggan, *server* Tapping Box tiba-tiba mengalami *loading* yang lambat jadinya data transaksi tidak terekam langsung.

Penulis : Lalu apa manfaat atau kelebihan dari Tapping Box?

Pegawai : Ya jadi manfaat dan kelebihannya itu pemilik usaha restoran ini dengan mudah untuk memantau penghasilan harian maupun mingguan mereka tanpa perlu menghitung ulang penghasilan yang mereka dapat serta bisa lebih efektif dan efisien, BPKPAD Kabupaten Batang juga dapat melakukan estimasi penerimaan pajak restoran perbulannya, BPKPAD Kabupaten Batang serta pemilik restoran dapat melihat dan memantau penghasilan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan, dapat mencegah kecurangan atau kebocoran pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran menjadi maksimal, dan penerimaan pajak restoran pun mengalami peningkatan dengan dipasangnya alat Tapping Box.

Penulis : Lalu bagaimana upaya dari BPKPAD Kabupaten Batang dalam mengatasi masalah tersebut?

Pegawai : Dari kami sudah melakukan beberapa upaya, antara lain yaitu membuat aturan yang memunculkan sanksi untuk Wajib Pajak Restoran yang menolak dipasang Tapping Box dan mencabut izin usaha tersebut, saat mengalami gangguan yang mengakibatkan data transaksi tidak terekam langsung, petugas BPKPAD mendatangi restoran tersebut dan memberikan saran agar memakai cara manual dengan cara mencatat setelah itu dimasukkan pada aplikasi di Tapping box, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menambahkan jumlah Tapping Box dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan, melakukan tinjauan secara berkala ke restoran yang telah dipasang Tapping Box, melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan penggunaan alat Tapping Box kepada Wajib Pajak Restoran, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Wajib Pajak Restoran serta petugas/kasir yang memegang Tapping Box, BPKPAD Kabupaten Batang menambah jumlah petugas pajak dan tim untuk mengawasi jalannya Tapping Box di restoran yang dipasang Tapping Box, dan untuk Wajib Pajak Restoran yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi.





7.99% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11050528

2 3 4 5 BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan

11 12 18 20

iuran wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang, bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). 44 Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk yang akan dialokasikan guna membiayai pengeluaran rutin pemerintah pusat, contoh dari pajak pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah terbagi kembali menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda terkait pajak daerah dan setiap daerah juga diberi kewenangan agar dapat mengelola sendiri pajak daerah apa saja yang dapat dipungut berdasarkan potensi di wilayah tersebut. Karena sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya dapat mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

REPORT #1105052814 JUL 2020, 12:00 AM

CHECKED
AUTHOR STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE 1 OF 31